

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Perkembangan Administrasi Publik melalui Kegiatan Edukasi Tata Kelola Pemerintahan

Siti Nur Zumairah Jusuf¹, Nurul Safika^{2✉}, Febrila Alfiah Monoarfa³, Inaya Paputungan⁴, Rizky Ramadhan Doludu⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

✉ **Corresponding Author:** Nurul Safika (e-mail: ffikahhh10@gmail.com)



This paper is an open-access paper distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC-BY)

Informasi artikel

Received : 13 Mei 2026
Revised : 18 Juli 2026
Published : 20 Juli 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sejarah dan perkembangan administrasi publik di dunia melalui metode literature review. Pengabdian ini bertujuan menganalisis perkembangan pemikiran administrasi publik melalui pendekatan literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik terhadap perubahan paradigma administrasi publik mulai dari Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), hingga New Public Service (NPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik berkembang dari praktik pemerintahan kuno hingga menjadi disiplin ilmu modern dengan berbagai paradigma, seperti Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). Saat ini, administrasi publik terus berkembang menuju pendekatan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis teknologi sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Kata kunci: Administrasi publik; Paradigma; Perkembangan global

ABSTRACT

This study looks at the history and development of public administration worldwide through a literature review method. The purpose of this work is to analyze the evolution of public administration thought using a literature review approach by examining various scientific sources such as books and relevant journal articles. The analysis is done through a thematic synthesis of the changes in public administration paradigms, from Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), to New Public Service (NPS). The findings show that public administration has evolved from ancient government practices into a modern discipline with various paradigms, such as Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), and New Public Service (NPS). Today, public administration continues to develop toward a more participatory, collaborative, and technology-based approach according to the increasingly complex needs of society.

Keywords: Public administration; Paradigm; Global development

1. PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Perkembangannya tidak terlepas dari perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan publik. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik mengalami perkembangan yang panjang, dimulai dari praktik pemerintahan pada masa peradaban kuno hingga berkembang menjadi ilmu modern pada akhir abad ke-19.

Pada tahap awal perkembangannya, administrasi publik banyak dipengaruhi oleh teori klasik yang menitikberatkan pada efisiensi, rasionalitas, serta pembagian struktur organisasi yang teratur. Namun, pendekatan tersebut dinilai kurang memperhatikan faktor manusia dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga lahir paradigma-paradigma baru. Old Public Administration (OPA) lebih menekankan birokrasi dan kepatuhan terhadap aturan, New Public Management (NPM) berorientasi pada peningkatan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip sektor swasta, sedangkan New Public Service (NPS) lebih mengutamakan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintahan.

Meskipun kajian mengenai administrasi publik telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih membahas paradigma tertentu secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan kajian historis yang menjelaskan keterkaitan perubahan paradigma administrasi publik mulai dari birokrasi klasik hingga pendekatan *digital governance* secara komprehensif.

Di tengah arus globalisasi, administrasi publik terus mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penerapan e-government, serta penggunaan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan administrasi publik menjadi hal yang penting guna mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, adaptif, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran administrasi publik secara historis serta mengidentifikasi perubahan paradigma administrasi publik mulai dari Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), hingga New Public Service (NPS).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai perkembangan administrasi publik serta pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan peserta terkait pemahaman administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil

identifikasi tersebut, tim menyusun materi yang relevan dengan kebutuhan peserta, meliputi sejarah perkembangan administrasi publik, perubahan paradigma Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS), serta perkembangan administrasi publik modern melalui konsep digital governance dan collaborative governance. Selain itu, tim melakukan koordinasi dengan pihak mitra untuk menentukan waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan, ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan mengaitkan konsep administrasi publik dengan fenomena penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Peserta diberikan pemahaman mengenai perubahan paradigma administrasi publik, mulai dari pendekatan birokrasi tradisional yang menekankan aturan dan hierarki, pendekatan manajemen publik yang berorientasi pada efisiensi dan kinerja, hingga pendekatan pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pemerintahan. Melalui diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, serta permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta selama kegiatan, sesi refleksi, serta umpan balik peserta terhadap materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan edukasi mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai perkembangan administrasi publik dan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3. HASIL KEGIATAN

Peningkatan Pemahaman tentang Perkembangan Administrasi Publik

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai perkembangan administrasi publik telah dilaksanakan sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dasar administrasi publik dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini memperoleh respons positif dari peserta karena materi yang disampaikan memiliki keterkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, khususnya dalam memahami perubahan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep dasar administrasi publik serta sejarah perkembangannya. Materi ini menjelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup proses pengelolaan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peserta diperkenalkan dengan perkembangan administrasi publik mulai dari sistem birokrasi tradisional hingga konsep tata kelola pemerintahan modern yang lebih terbuka dan partisipatif.

Pemahaman terhadap Perubahan Paradigma Administrasi Publik

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perubahan paradigma administrasi publik. Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, peserta memahami bahwa paradigma Old Public Administration (OPA) menekankan pentingnya struktur birokrasi, aturan formal, hierarki organisasi, serta kepatuhan terhadap prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, peserta memperoleh pemahaman mengenai paradigma New Public Management (NPM) yang muncul sebagai upaya memperbaiki kelemahan birokrasi tradisional melalui penerapan prinsip manajemen sektor swasta, seperti orientasi kinerja, efisiensi, efektivitas, dan pengukuran hasil pelayanan publik. Peserta juga memahami bahwa pendekatan NPM memiliki keterbatasan karena terlalu menekankan aspek manajerial dan kurang memperhatikan nilai sosial dalam pelayanan publik.

Selain itu, kegiatan edukasi juga memberikan pemahaman mengenai konsep New Public Service (NPS) yang menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak dan peran dalam proses pemerintahan. Melalui paradigma ini, peserta memahami pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Penerapan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Modern

Selain memahami perkembangan paradigma administrasi publik, peserta juga memperoleh wawasan mengenai pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan modern melalui konsep **digital governance** dan **collaborative governance**. Peserta memahami bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta inovasi pelayanan publik.

Diskusi selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya perubahan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun kerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan publik.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan hasil evaluasi melalui diskusi dan umpan balik peserta, kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai perkembangan administrasi publik dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Peserta menunjukkan antusiasme melalui keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan penyampaian pendapat terkait praktik administrasi publik di lingkungan pemerintahan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat dalam memperluas wawasan peserta mengenai pentingnya administrasi publik yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi peserta untuk lebih kritis dalam melihat berbagai

fenomena pemerintahan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Perbandingan Paradigma Administrasi Publik

1. Perbedaan Tujuan Utama

Masing-masing paradigma dalam administrasi publik memiliki orientasi tujuan yang berbeda. OPA menekankan efisiensi, kestabilan organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi formal. NPM lebih mengarah pada efisiensi biaya serta peningkatan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip sektor swasta dalam birokrasi pemerintahan. Adapun NPS berfokus pada kepentingan publik melalui pelayanan yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Perbedaan Peran Pemerintah

Dalam paradigma OPA, pemerintah berfungsi sebagai pengendali utama yang melaksanakan kebijakan secara hierarkis dari pusat hingga daerah. Pada NPM, peran pemerintah berubah menjadi pengarah dengan memberikan ruang bagi mekanisme pasar serta persaingan dalam pelayanan publik. Sementara itu, dalam NPS pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat yang memfasilitasi kerja sama, dialog, dan penyelesaian persoalan publik secara bersama.

3. Perbedaan Posisi Masyarakat

OPA memandang masyarakat sebagai pihak pasif yang hanya menerima pelayanan serta aturan dari pemerintah. NPM kemudian menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang menilai mutu layanan berdasarkan tingkat kepuasan. Berbeda dengan kedua paradigma tersebut, NPS memosisikan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak, kewajiban, dan keterlibatan aktif dalam menentukan kebijakan publik.

4. Perbedaan Pendekatan Manajemen

OPA menerapkan sistem birokrasi yang kaku melalui struktur hierarkis dan aturan yang ketat. NPM menggunakan manajemen yang lebih fleksibel dengan menerapkan desentralisasi, kontrak kinerja, serta prinsip-prinsip bisnis guna meningkatkan efisiensi. Sementara itu, NPS mengutamakan pendekatan kolaboratif melalui kerja sama lintas sektor serta akuntabilitas yang tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga nilai sosial dan kepentingan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis, dimulai dari praktik pemerintahan pada masa lampau hingga berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang modern. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi, sehingga konsep administrasi publik terus mengalami transformasi, dari yang

semula berfokus pada efisiensi dan rasionalitas, menjadi lebih memperhatikan dimensi manusia serta keterlibatan masyarakat.

Paradigma Old Public Administration (OPA) berorientasi pada sistem birokrasi yang bersifat hierarkis, menekankan kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga stabilitas organisasi. Namun, pendekatan ini dinilai kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian muncul New Public Management (NPM) yang mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta guna meningkatkan efisiensi dan kinerja pelayanan publik, meskipun sering dikritik karena terlalu menekankan mekanisme pasar. Selanjutnya, New Public Service (NPS) hadir sebagai pendekatan yang lebih menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang aktif, dengan menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam perkembangannya saat ini, administrasi publik juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi melalui konsep digital governance serta penguatan kolaborasi antar berbagai aktor. Oleh karena itu, tidak ada satu paradigma yang dapat dianggap paling ideal untuk diterapkan secara universal. Administrasi publik modern dituntut untuk mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada institusi pendidikan, dosen pembimbing, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan fasilitas selama proses penulisan. Selain itu, kami juga mengapresiasi kontribusi dari keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui motivasi, saran, maupun dukungan lainnya. Ucapan ini menjadi bentuk penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Agus, A. (2019). Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service Melalui Model Citizen's Charter. *Politeia: Jurnal Kajian Politik Islam*, 2, 137–152.
- Agustini, R. (2024). Service Model for Women's and Children's Violence Victims of Collaborative Governance and Delivery Service. *Journal of Public Administration*, 6, 1–12.
- Bilici, G., & Pekküçükşen, Ş. (2022). New Public. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 24, 655–669.
- Busri, B., Malik, I., & Wahid, N. (2023). Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19, 85–119.

- Castello Branco, L. S. (2018). Administração Pública Gerencial: As Metas Do Conselho Nacional De Justiça. *Revista Práticas de Administração Pública*, 1, 4–23.
- Çolak, Ç. D. (2019). Why the New Public Management is Obsolete. *Journal of Management and Economics Research*, 17, 133–145.
- Egawati, A. (2022). The Impact of New Public Management Approach Toward Digital Government in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 1, 95–101.
- Ejersbo, N., & Greve, C. (2013). Et farvel efter 30 år?: New Public Management og moderniseringen af den offentlige sektor. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 17, 195–210.
- Ferlie, E., & Steane, P. (2002). Changing Developments in NPM. *Public Management Review*, 4, 145–172.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP*, 4, 25–37.
- Hardiyansyah, H., & Aprini, N. (2023). Institutional Development of the Local Water Company Tirta Lematang Lahat to Improve Service Quality through Diagnosis and Intervention: Weisbord's Six-Box Model Approach. *International Journal of Social Service and Research*, 3, 2533–2544.
- Hardiyansyah, H., Junita, R., & Triana, D. E. (2018). Analysis of Public Satisfaction Index on the Regional Library Service at the Autonomous Regency. *International Journal of Social Sciences*, 1, 103–110.
- Ignacy, J. (2016). The Development of Management Control as a New Public Management Tool – Diagnosis of Polish Municipalities in the Light of Empirical Research. *Humanities and Social Sciences*, 21, 145–159.
- Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8, 167–180.
- Kalalo, E., Putri, I. N., Mariana, L., & Kurniawan, B. (2024). The Influence of Public Administration Science Paradigm Shift in Its Realization Good Governance. *International Journal Reglement & Society*, 5, 38–47.
- Karlsson, T. S., & Olsson, J. (2018). Considering Civil Servants: Emerging Roles and Contexts. *International Journal of Public Administration*, 41, 149–152.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 168–180.
- Marliani, L. (2019). Sejarah Perkembangan Administrasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(2614–2945), 252–259.
- Mayasiana, N. A., Prayitno, H., & Helpiastuti, S. B. (2024). Citizen Power as A Sustainable Transformation of Population Services. *International Journal of Public Policy*, 5, 246–258.
- Mozin, S. Y., Abjul, M. N., Gunibala, F., Abuba, R. Y., & Wahab, I. M. (2026). *Evolusi Paradigma Pelayanan Publik: Dari Old Public Administration hingga Network Governance*. 3, 24–35.
- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1, 24–33.

- Mutiarin, D., & Misran, M. (2021). New Public Management New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies. *Journal of Public Administration and Governance*, 11, 118–132.
- Nasiratunnisaa Mallappiang, & Muharram. (2024). Pengantar Administrasi Publik. In *Eureka Media Aksara* (Issues 978-623-120-470-7).
- Noordiatmoko, D., & Riyadi, B. S. (2023). The Analysis of Sustainable Performance Management of Government Institution in Indonesia: A Public Policy Perspective. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6, 3226–3234.
- Paselle, E. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*, 5, 61–75.
- Périac, E. (2015). The Challenge of Multi-Actor Governance in Public Administration: The Implementation of a New Environmental Public Policy. *Gestion et Management*, 1, 1–450.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Membaca Sejarah dalam Membangun Negara : Perspektif Historis dalam Reformasi Administrasi Publik. *Jurnal of Civic Education Research*, 3(2), 67–78.
- Saleh, M., Pathiassana, M. T., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa terhadap Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, 4(2A), 30–42.
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*, 9, 52–65.
- Şen, A. T. (2024). From Traditional Public Administration To Digital Hybrid Public Administration. *Turkish Journal of Science and Health*, 5, 54–65.
- Sudrajat, A. R. (2023). Analysis of Indonesian Public Service Issues in The New Era based on Public Administration Perspective. *International Journal of Social Service and Research*, 3, 261–271.
- Sukma, D., Sumartono, A., Muluk, K., & Wijaya, A. F. (2022). Administration City Institutional Arrangement Model in the Implementation of Local Government in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9, 220–234.
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2020), 167–186.
- Wicaksono, K. (2012). Penataan Ulang Administrasi Publik di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 147–152. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.147-152>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Marliani, L. (2019). Sejarah perkembangan administrasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6, 252–259.
- Mozin, S. Y., Abjul, M. N., Gunibala, F., Abuba, R. Y., & Wahab, I. M. (2026). Evolusi paradigma pelayanan publik: Dari Old Public Administration hingga Network Governance. *Jurnal*, 3, 24–35.

- Nasiratunnisaa, & Muharram. (2024). *Pengantar administrasi publik*. Eureka Media Aksara.
- Pardi. (2024). Perkembangan dan tantangan ilmu administrasi di era globalisasi.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Membaca sejarah dalam membangun negara: Perspektif historis dalam reformasi administrasi publik. *Journal of Civic Education Research*, 3(2), 67–78.
- Sengkuni Journal. (2023). Pengaruh teknologi terhadap transformasi administrasi publik.
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran dalam paradigma ilmu administrasi publik. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1, 167–186.
- Wicaksono, K. (2012). Penataan ulang administrasi publik di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 147–152. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.147-152>